

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Karakter

1. Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter sebagai sebuah pedagogi yang memberikan perhatian penting bagi pertumbuhan manusia yaitu perkembangan kemampuan kodrati manusia sebagaimana dimiliki secara berbeda oleh tiap individu (naturalis). Pengembangan kemampuan kodrati ini manusia tidak dapat mengabaikan relasi negatifnya dengan lingkungan sosial dan dalam relasi antara individu dan masyarakat ini, manusia mengarahkan diri pada nilai-nilai. Samani dan Hariyanto (2013:45) berpendapat bahwa Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga serta rasa dan karsa.

Pendidikan karakter menurut Wibowo (2013:40) adalah suatu pendidikan yang digunakan untuk menanamkan dan mengembangkan karakter kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki karakter yang luhur setelah memiliki maka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Dilengkapi dengan pendapat Salahudin (2013:42) bahwa Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan moral atau budi pekerti untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya.

Pendidikan karakter menurut (Ardi, 2013:28) adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya, yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai dengan pendidikan moral, pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan

watak, yang bertujuan untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Pendidikan karakter menurut Agus (2012:20) merupakan usaha aktif yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan (*habit*) sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter juga disebut sebagai pendidikan nilai. Namun Wiyani (2013:70) berpendapat bahwa karena karakter adalah *value in action* atau nilai yang diwujudkan dalam tindakan. Karakter juga disebut *operative value* atau nilai-nilai yang dioperasionalkan dalam tindakan. Pendidikan karakter pada dasarnya merupakan upaya dalam proses menginternalisasikan, menghadirkan, menyamai, dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan pada diri peserta didik, dengan diinternalisasikan nilai-nilai kebajikan pada diri peserta didik diharapkan dapat mewujudkan perilaku baik.

Berdasarkan pendapat ketiga sumber tersebut pendidikan karakter dapat disimpulkan sebagai usaha yang dilakukan untuk mendidik anak agar mempunyai sikap, akhlak, budi pekerti yang baik sehingga dapat memberikan dampak yang baik pada lingkungannya.

2. Tujuan Pendidikan Karakter

Ardi (2013:72) berpendapat secara Operasional tujuan pendidikan karakter dalam *setting* sekolah sebagai berikut :

“Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan.”

Tujuan pertama pendidikan karakter yaitu dapat memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik pada saat masih bersekolah maupun setelah lulus. Penguatan dan pengembangan memiliki makna bahwa pendidikan dalam setting sekolah bukan merupakan dogmatisasi nilai, tetapi sebuah proses yang membawa peserta didik agar memahami dan merefleksi pentingnya mewujudkan nilai-nilai dalam perilaku keseharian. Penguatan juga mengarahkan proses pendidikan pada proses pembiasaan yang dilakukan, baik dalam setting kelas maupun sekolah. Penguatan pun memiliki makna adanya hubungan antara penguatan perilaku melalui pembiasaan di sekolah dan dengan di rumah.

Berdasarkan kerangka hasil pendidikan karakter di sekolah pada setiap jenjang, lulusan sekolah akan memiliki sejumlah perilaku khas sebagaimana nilai yang dijadikan rujukan sekolah tersebut. Asumsi yang terkandung dalam tujuan:

- a. Penguatan dan pengembangan karakter. Sebagai tujuan perantara untuk terwujudnya suatu karakter. Hal ini berimplikasi bahwa proses pendidikan harus dilakukan secara kontekstual.
- b. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah.

Tujuan kedua pendidikan karakter disekolah yaitu dapat mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan sekolah. Tujuan ini memiliki makna bahwa tujuan pendidikan karakter memiliki sasaran untuk meluruskan berbagai perilaku negatif anak

menjadi positif. Proses penelusuran yang dimaknai sebagai pengoreksian perilaku negatif diarahkan pada pola pikir anak. Kemudian dibarengi dengan keteladanan lingkungan sekolah dan rumah, selanjutnya proses pembiasaan berdasarkan tingkat dan jenjang sekolahnya.

- c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab karakter bersama.

Tujuan ketiga dalam pendidikan karakter disekolah yaitu dapat membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dengan memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Tujuan ini bermakna bahwa karakter disekolah harus dihubungkan dengan proses pendidikan dikeluarga. Jika pendidikan disekolah hanya bertumpu pada interaksi antara peserta didik dengan guru di kelas dan sekolah, maka pencapaian berbagai karakter yang diharapkan akan sulit tercapai. Disebabkan penguatan perilaku merupakan suatu hal yang holistik/menyeluruh, bukan satu rentang waktu tertentu 12 pada masa usia anak. Dalam setiap menit dan detik, interaksi anak dengan lingkungannya dapat dipastikan akan terjadi proses memengaruhi perilaku anak.

Tujuan pendidikan karakter menurut Fadlillah (2013:25) menjelaskan sebagai berikut :

“1) Pendidikan Karakter dapat mengembangkan nurani atau afektif pada peserta didik. 2) Bertujuan untuk mengembangkan kebiasaan dan perilaku pada peserta didik sesuai dengan nilai universal serta nilai pada tradisi budaya bangsa yang bersifat religius. 3) Bertujuan untuk menanamkan nilai kepemimpinan dan juga jiwa kepemimpinan serta tanggung jawab pada peserta didik yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. 4) Bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada peserta didik agar menjadi manusia yang mempunyai sikap

mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. 5) Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan sikap persahabatan, jujur, serta kreativitas di dalam lingkungan sekolah dengan rasa kebangsaan yang tinggi”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter dalam pendidikan formal bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter agar nantinya peserta didik dapat menjadi manusia yang beriman, jujur, bertanggung jawab, serta berjiwa kebangsaan agar peserta didik menjadi generasi penerus bangsa.

3. Prinsip-prinsip Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter di sekolah akan terlaksana dengan lancar, jika guru dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan karakter. Aryani, BI. (2010:13) memberikan rekomendasi 10 prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif sebagai berikut :

- 1) Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter;
- 2) Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku;
- 3) Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk membangun karakter;
- 4) Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian;
- 5) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik;
- 6) Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan membantu mereka untuk sukses;
- 7) Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada peserta didik;
- 8) Mengungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama.
- 9) Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter;
- 10) Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik.

4. Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar

Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran.

Pendidikan karakter melalui materi pembelajaran berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pembelajaran mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif baik, serta mampu memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik mengenai kehidupan sehari-hari di masyarakat (Amri, 2011:52). Penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah menurut Wibowo (2012:86) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Nilai-nilai karakter yang akan dicapai dicantumkan di dalam RPP dan juga silabus yang dibuat oleh pendidik. Berdasarkan pendapat mengenai Implementasi Pendidikan karakter di Sekolah Dasar maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan karakter di Sekolah Bisa terlaksana apabila semua pihak atau warga sekolah selalu menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik mulai dari kegiatan pembelajaran yang menjadi kunci utama keberhasilan Implementasi pendidikan karakter di sekolah maka dari itu guru harus berperan aktif untuk melaksanakan pendidikan karakter.

B. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Wahab, A. (dalam Cholisin, 2000:18) berpendapat bahwa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah media pengajaran yang mengIndonesiakan para peserta didik secara sadar, cerdas, serta penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, program PKn memuat berbagai konsep umum ketatanegaraan, politik & hukum negara, serta teori umum lainnya yang cocok dengan target tersebut.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar & Menengah ialah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami & mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, serta berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila & UUD 1945.

Zamroni (Tim ICCE, 2005:7), berpendapat pendidikan kewarganegaraan adalah “Pendidikan demokrasi yang bertujuan dalam mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis & bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi itu merupakan bentuk kehidupan dalam masyarakat yang paling menjamin hak-hak dari warga masyarakat”. Pendidikan politik yang memiliki tujuan untuk bisa membantu peserta didik untuk bisa menjadi warga negara yang secara politik dewasa Serta ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Samsuri (2011:28) adalah merupakan

“mata pelajaran yang memfokuskan pembentukan warga negara yang dapat memahami & bisa melaksanakan hak-hak serta kewajiban untuk menjadi warga

negara Indonesia yang cerdas, terampil, & berkarakter yang di amanatkan oleh Pancasila & UUD 1945. **Pendidikan kewarganegaraan** dapat diartikan sebagai penyiapan generasi muda dalam hal ini pelajar (peserta didik) untuk menjadi seorang warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, & nilai-nilai yang di perlukan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya”.

Kerr (dalam Samsuri, 2011: 29) menyatakan bahwa *Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process.* (Pendidikan kewarganegaraan itu dirumuskan secara luas yang telah mencakup proses penyiapan generasi muda untuk bisa mengambil peran & tanggung jawab sebagai warga negara, serta secara khusus, peran pendidikan ini termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran & belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut).

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendiakan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon penerus bangsa yang sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Tujuan lain pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Secara umum pendidikan kewarganegaraan ini juga memiliki tujuan untuk mendidik setiap warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang terlukis dalam sebuah tulisan Somantri

(2001 : 279) yaitu : **“Warga negara yang patriotik, toleransi, dan setia kepada bangsa dan negara ini juga memiliki agama, demokratis, dan juga Pancasila sejati”**.

Djahiri (1995 : 10) menyatakan suatu pendapat bahwasannya dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini seseorang tersebut diharapkan agar dapat:

“1). paham dan juga dapat menguasai secara rasional konsep dan juga norma Pancasila sebagai filsafat, dari dasar suatu ideologi dan juga suatu pandangan hidup negara RI.; 2) Paham tentang konstitusi *UUD NKRI 1945* dan ketentuan – ketentuan hukum yang sudah berlaku; 3) Mendalami dan berkeyakinan terhadap tatanan dalam suatu moral seperti dalam ketentuan yang sudah berlaku; 4) Mengamalkan serta merefleksikan hal – hal ini sebagai cerminan dari tingkah laku dalam kehidupannya dengan penuh dengan keyakinan dan juga nalarnya”.

3. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di SD

Hakikat pendidikan kewarganegaraan di SD telah dianggap sebagai program pendidikan nilai Pancasila, pendidikan karakter dalam rangka untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa, yang diharapkan menjadi suatu identitas yang dalam bentuknya perilaku dalam kehidupannya sehari – hari. Pelajaran dalam bentuk pendidikan mandiri itu banyak yang bervariasi dalam hal agama, Urusan Sosial, budaya, bahasa, usia dan juga kelompok etnis, fokus pada pembentukan warga negara yang untuk memahami hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia, dan Bisa latihan yang sangat cerdas, terampil dan juga berkarakteristik seperti yang sudah ada di Pancasila dan juga UUD 1945.

4. Komponen Pendidikan Kewarganegaraan

Berikut 3 kompetensi pendidikan kewarganegaraan menurut Winataputra (2001:44), yaitu sebagai berikut dibawah ini :

a. Watak Kewarganegaraan

Watak kewarganegaraan atau *Civic Disposition*, komponen – komponen ini juga sesungguhnya merupakan suatu dimensi yang paling substantif dan juga esensial didalam mata pelajaran PKN. Dimensi watak Kewarganegaraan ini dapat dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua dimensi pada sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan juga tujuan mata pelajaran PKN, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan juga potensi yang lainnya yang bersifat afektif.

b. Pengetahuan Kewarganegaraan

Pengetahuan Kewarganegaraan atau *Civic Knowledge*, kandungan atau dengan nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negaranya. (Branson, 1999 : 8). Aspek ini menyangkut dengan suatu kemampuan akademik dan keilmuan yang sudah dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan juga moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini merupakan suatu bidang kajian multi disipliner. Secara lebih rinci lagi, materi pengetahuan kewarganegaraan ini juga meliputi suatu pengetahuan tentang : Hak dan tanggung jawab bagi warga negaranya dan hak asasi manusia, prinsip – prinsip dan proses demokrasi dan juga lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan yang berdasarkan dengan hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, nilai – nilai dan juga norma – norma dalam masyarakatnya.

c. Keterampilan Kewarganegaraan

Keterampilan Kewarganegaraan atau *Civic Skills*, yang meliputi intelektual (intellectual skills) dan juga untuk keterampilan berpartisipasi (participatory skills) didalam kehidupan yang berbangsa dan juga bernegara. Contoh keterampilan intelektual ialah merupakan suatu keterampilan dalam merespon dan berbagai persoalan politik, contohnya untuk merancang dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi ialah merupakan suatu keterampilan dengan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, contohnya segera melapor kepada polisi atas kejadiannya kejahatan yang diketahui.

Disimpulkan melalui muatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat tepat untuk membina, mengembangkan, menginternalisasikan pendidikan karakter dalam upaya pencegahan perilaku dekadensi moral di kalangan remaja, khususnya diawali dari pendidikan di Sekolah Dasar.

C. Dekadensi Moral

1. Pengertian Dekadensi Moral

Moral atau perilaku merupakan suatu hal yang perlu dijaga, terlebih oleh para generasi muda. Karena faktanya, sekarang ini, moral generasi muda sedang mengalami penurunan atau yang bisa disebut dengan dekadensi moral. Dekadensi moral dapat dikatakan bentuk perubahan sosial dimana kebanyakan moral penerus bangsa sedang mengalami kemunduran, kemerosotan atau perubahan yang jatuh.

Moral yang dimiliki generasi penerus bangsa jauh sekali dari apa yang diajarkan oleh nenek moyang zaman dahulu. Seperti halnya perubahan pada sifat seseorang,

perubahan moral juga terjadi karena pengaruh suatu dan lain hal. Generasi muda nampak, perubahan moral itu sendiri banyak terjadi akibat adanya pengaruh budaya asing yang diterima secara mentah-mentah.

Banyak pengaruh asing yang berdampak positif, seperti misalnya terkait teknologi dan sejenisnya. Kehadiran teknologi-teknologi canggih tersebut banyak kemudahan dan keuntungan yang dirasakan masyarakat.

2. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Dekadensi Moral

Solusi terbaik yang ditawarkan dari kejadian kemerosotan moral di kalangan generasi tunas bangsa, alangkah lebih baiknya kita mencari sebab atau mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya dekadensi moral. Banyak faktor yang bisa menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Diantaranya adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pertama, longgarnya pegangan terhadap agama. Sudah menjadi tragedi di dunia maju, dimana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga keyakinan beragama mulai terdesak, kepercayaan terhadap Tuhan tinggal simbol, larangan-larangan dan perintah-perintah Tuhan tidak diindahkan lagi.

Longgarnya pegangan seseorang pada ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada di dalam dirinya. Dengan demikian, satu-satunya alat pengawas dan pengatur moral yang dimilikinya adalah masyarakat dengan hukum dan peraturannya. Namun biasanya pengawasan masyarakat itu tidak sekuat pengawasan dari dalam diri sendiri. Karena pengawasan masyarakat itu datang dari luar, jika orang tidak tahu, atau

tidak ada orang yang disangka akan mengetahuinya, maka dengan senang hati orang itu akan berani melanggar peraturan-peraturan dan hukum sosial itu.

Banyak orang melakukan pelanggaran dalam masyarakat, dengan sendirinya orang yang kurang iman tadi akan mudah pula meniru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama (Daradjat, Z. 1978:66). Mulkhan, A.M (2008:29) berpendapat sebagai *conditioning* terjadinya evolusi budaya masyarakat. Akan tetapi, jika setiap orang dengan teguh memegang keyakinannya kepada Tuhan serta menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi adanya pengawasan yang ketat, karena setiap orang sudah dapat menjaga dirinya sendiri dan mampu menyeleksi pengaruh dari lingkungan (*Structured Person* - meminjam istilah yang dipakai Mulkhan, A.M.). Sebaliknya, dengan semakin jauhnya masyarakat dan agama (sekuler), semakin susah memelihara moral orang dalam masyarakat itu, dan semakin kacaulah suasana karena semakin banyak pelanggaran-pelanggaran hukum dan nilai moral.

Kedua, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat. Pembinaan moral yang dilakukan oleh ketiga institusi ini tidak berjalan menurut semestinya (normatif) atau yang sebisanya (objektif). Pembinaan moral di rumah tangga misalnya harus dilakukan dan sejak anak masih kecil, sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Tanpa dibiasakan menanamkan sikap yang dianggap baik untuk menumbuhkan moral, anak-anak akan dibesarkan tanpa mengenal moral itu.

Pembinaan moral yang dilakukan di rumah tangga bukan dengan menyuruh menghafal rumusan tentang baik dan buruk, melainkan harus dibiasakan. Daradjat, Z. (1978:67) mengatakan,

“Moral bukanlah suatu pelajaran yang dapat dicapai dengan mempelajari saja, tanpa membiasakan hidup bermoral sejak kecil. Moral itu tumbuh dari tindakan kepada pengertian dan tidak sebaliknya. Seperti halnya rumah tangga, yang dijadikan sebagai *basic-education*, sekolah pun memiliki peranan penting dalam pembinaan moral anak didik”

Hendaknya sekolah dapat dijadikan sebagai lapangan untuk menumbuhkan kembangkan mental dan moral anak didik, di samping ilmu pengetahuan, pengembangan bakat dan kecerdasan. Untuk menumbuhkan sikap moral yang demikian itu, pendidikan agama di sekolah harus dilakukan secara intensif agar ilmu dan amal dapat dirasakan anak didik di sekolah. Apabila pendidikan agama/moral diabaikan di sekolah, maka pendidikan agama/moral yang diterima di rumah tidak akan berjalan dengan baik, bahkan mungkin paradoks (berlawanan), dan berdampak pada kegagalan pendidikan moral.

Rumah tangga dan sekolah, masyarakat juga memiliki peran dalam pembinaan moral. Masyarakat dapat sebagai kontrol secara eksternal dan bersifat penting dalam pembinaan moral. Hadirnya masyarakat yang rusak moralnya akan sangat berpengaruh pada perkembangan moral anak. Karena kerusakan masyarakat itu sangat besar pengaruhnya dalam pembinaan anak, maka harus segera diatasi. Terjadinya kerusakan moral di kalangan pelajar dan generasi muda sebagaimana dijelaskan di atas, bisa dikarenakan tidak efektifnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembinaan moral. Ketiga instansi pendidikan ini harus berjalan seiringan dalam pendidikan atau pembinaan moral. Hal senada juga disampaikan oleh Maragustam (2010:118), bahwa tanggung jawab pembinaan moral sebagai bagian dari pendidikan Islam merupakan perwujudan atas pendidikan keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui sekolah yang dimilikinya.

Ketiga, derasnya arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekularistis. Seperti banyak informasi yang kita ketahui melalui beberapa media cetak atau elektronik (televisi) tentang anak-anak sekolah menengah yang ditemukan oleh gurunya atau polisi mengantongi obat-obat terlarang, gambar-gambar dan video yang berbau porno, alat-alat kontrasepsi seperti kondom, dan benda-benda tajam. Semua benda yang ditemukan tersebut merupakan benda yang terindikasi atau ada kaitannya dengan penyimpangan moral yang dilakukan oleh kalangan remaja usia sekolah.

Gejala penyimpangan tersebut terjadi karena pola hidup yang semata-mata mengejar kepuasan materi, kesenangan hawa nafsu, dan tidak mengindahkan nilai-nilai agama. Timbulnya sikap perbuatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari derasnya arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekularistis yang disalurkan melalui tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, siaran-siaran, pertunjukan-pertunjukan, film, lagu-lagu, permainan-permainan, dan sebagainya. Penyaluran arus budaya yang demikian itu didukung oleh para penyandang modal yang semata-mata mengeruk keuntungan material dengan memanfaatkan kecenderungan para remaja, tanpa memerhatikan dampaknya bagi kerusakan moral. Derasnya arus budaya yang demikian disinyalir termasuk faktor yang paling besar andilnya dalam menghancurkan moral para remaja dan generasi tunas bangsa.

Keempat, belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Pemerintah yang diketahui memiliki kekuasaan (*power*), uang, teknologi, sumber daya manusia, dan sebagainya nampaknya belum menunjukkan kemauan sungguh-sungguh untuk melakukan pembinaan moral bangsa (Abuddin Nata, 2012:207). Hal yang demikian semakin diperparah lagi oleh adanya ulah sebagian elite penguasa yang semata-mata

mengejar kedudukan, peluang, kekayaan, dan sebagainya dengan cara-cara yang sama sekali tidak mendidik, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang hingga kini belum ada tanda-tanda untuk hilang.

Mereka asyik memperebutkan kekuasaan, materi, dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak terpuji, dengan tidak memperhitungkan atau bahkan sama sekali tidak memperhitungkan dampaknya bagi kerusakan moral bangsa. Bangsa jadi ikut-ikutan, tidak mau lagi mendengarkan apa yang disarankan dan dianjurkan pemerintah, karena secara moral mereka sudah kehilangan daya efektivitasnya.

Teknologi luar yang memicu dekadensi moral, tak dapat dipungkiri bahwa salah satu teknologi canggih yang banyak andil dalam peningkatan dekadensi moral yaitu melalui sarana handphone dan Televisi, dengan mengguangguh internet. Sekarang ini, semua orang, bahkan anak-anak sekalipun, dapat mengakses internet dengan mudahnya. Mereka bisa mengaksesnya kapan saja dan dimana saja, lebih mirisnya lagi tanpa pengawasan orang tua.

Banyak anak muda yang mudah terpengaruh dengan apa yang bisa mereka temukan di internet. Mereka bebas keluar masuk situs-situs terlarang atau mengikuti trend hingga banyak sekali anak-anak yang terjerumus dengan pergaulan bebas. Tak hanya pergaulan bebas saja, sekarang ini ada banyak lagi contoh dekadensi moral yang banyak terjadi, diantaranya: a) Pemerkosaan dan pencabulan; b) Korupsi; c) Tawuran; d) Narkoba dan miras.

3. Cara Mengatasi Dekadensi Moral

Beberapa cara untuk mengatasi dekadensi moral menurut Djahiri (1996: 22-60)

yaitu:

- 1) Pengawasan, memperhatikan dan mengarahkan anak. Seorang anak memerlukan pengawasan, perhatian juga pengarahan dari orang tua masing-masing. Mereka masih belum mengerti apa yang mereka lakukan itu benar atau salah. Maka, mendidik dan menuntut mereka untuk bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan.
- 2) Memberikan pendidikan karakter. Sebelum anak masuk sekolah, orang tua sudah memberikan pendidikan moral pada mereka. Orang tua dapat mengajarkan mereka bagaimana caranya bersikap sopan, ramah, toleransi, dan nilai-nilai budi pekerti luhur lainnya.
- 3) Penegakan hukum yang seadil-adilnya. Salah satu masalah di Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan yaitu mengenai hukum. Di Indonesia sendiri, bisa dibilang, hukum yang berlaku masih sangat lemah, Mengapa? Sebenarnya, hukum ditegakkan untuk memberikan keadilan, namun sayangnya sekarang hukum bisa dibeli. Ketika ada seseorang yang dihukum dan mereka memiliki banyak uang, mereka bisa membelinya dengan begitu semua tuntutan yang diajukan tidak berlaku. Jika saja hukum berlaku setegas-tegasnya, dekadensi moral ini dapat berkurang.
- 4) Meningkatkan pendidikan agama dan karakter atau moral. Di Indonesia terdapat beragam agama yang hidup satu dalam tentram dan damai. Sikap toleransi terhadap orang yang berbeda agama sangatlah dianjurkan. Tak hanya sikap toleransinya saja, tetapi harus menanamkan pendidikan agama dan karakter atau budi pekerti atau moral agar mereka tidak terjerumus dalam dekadensi moral. Setiap agama mengajarkan semua hal positif dan melarang hal-hal negatif.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini memperoleh referensi atau semacam arahan deskriptif oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yakni:

- 1) Hery Nugroho tentang Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Agama Islam di SMAN 3 Semarang.

Penelitian kualitatif yang dilakukan di SMAN 3 Semarang terkait implementasi pendidikan karakter, yang menjadi acuan pada penelitian tesis ini. Hasil penelitian ini

adalah tentang bagaimana nilai-nilai dalam pendidikan karakter dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik SMAN 3 Semarang, diantaranya: Pertama, nilai karakter religius; Kedua, nilai karakter jujur. Ketiga, nilai karakter mandiri. Keempat, nilai karakter kerja keras. Kelima, nilai karakter toleransi. Keenam, nilai karakter disiplin. Ketujuh, nilai karakter menghargai prestasi. Kedelapan, nilai karakter gemar membaca.

Kesembilan, nilai karakter kreatif. Kesepuluh, nilai karakter demokratis. Kesebelas, nilai karakter rasa ingin tahu. Kedua belas, nilai karakter cinta damai. Ketiga belas, nilai karakter peduli lingkungan. Keempat belas, nilai karakter peduli sosial. Dari keempat belas karakter tersebut menunjukkan kegiatan pesantren Ramadan adalah positif. Sekarang tergantung peserta didiknya, ikhlas mengikuti kegiatan tersebut atau karena keterpaksaan.

2) Risdiyah Shinta Wulandari tentang Upaya Mengatasi Dekadensi Moral Melalui Pendidikan Karakter (2016).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti tentang upaya mengatasi dekadensi moral melalui pendidikan karakter di SMP Negeri 5 Kasubun Padang. Penelitian ini meneliti tentang kebiasaan (habit) peserta didik agar tahu hal-hal yang baik dan benar dan hal-hal yang buruk atau merugikan sampai pada suatu kemampuan untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai dan kepribadiannya. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pendidikan karakter dapat yang benar yang dapat memadukan antara pengetahuan, perasaan dan tindakan.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan yang telah teridentifikasi (18 nilai) yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai

pendapat, bersahabat,, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab (Pusat Kurikulum, Pengembangan dan Pendidikan Nilai dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah, 2009:910)

3) Rohmatul Laelah tentang Upaya Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Karakter Pada Peserta didik Melalui Kegiatan Keagamaan di MI Ma' Arif Bego Sleman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanaman nilai karakter pada peserta didik melalui kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di MI Ma/arif Bego digolongkan menjadi beberapa bentuk kegiatan antara lain: 1) kegiatan ekstrakurikuler meliputi hadroh, qiroah, dan pencak silat; 2) kegiatan pembiasaan dan hafalan asmaul husna; dan 3) kegiatan pembiasaan terprogram meliputi mujahadah, pengajian ahad pagi, idhul qurban, PHBI dan lomba keagamaan. Hasil dari penanaman nilai karakter antara lain, jujur, disiplin, mandiri, kreatif, peduli sosial, kerja keras, tanggung jawab, peduli lingkungan, peduli sosial, demokratis, religius dan komunikatif. Penanaman nilai karakter di MI Ma'arif Bego terlaksana dengan baik karena adanya perencanaan yang matang, kerja sama dengan semua warga sekolah dan masyarakat, adanya *reward and punishment* dan keteladanan oleh para guru dan karyawan.

4) Vera Yuli Erviana tentang Penanganan Dekadensi Moral melalui Penerapan Karakter Cinta Damai dan Nasionalisme di SD Muhammadiyah Karangtengah Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta (2017).

Penelitian Vera tentang permasalahan rusaknya moral bangsa dapat diamati dari memudarnya perilaku peserta didik yang dicermati dari cara berperilaku, bertutur kata yang kurang sopan dan tidak beretika. Penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan penanganan dekadensi moral melalui penerapan pendidikan karakter cinta damai dan nasionalisme di SD Muhammadiyah Karang tengah. Penelitian ini termasuk jenis

penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian adalah kepala sekolah, guru kelas, guru PJOK, guru PAI, serta peserta didik. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis mengindikasikan bahwa dalam mengurangi kemrosotan moral peserta didik di usia sekolah dasar, pihak sekolah menanamkan pendidikan karakter cinta damai dan nasionalisme melalui pembiasaan, integrasi dalam pembelajaran, serta melalui budaya sekolah. Dalam penerapan pendidikan karakter tidak hanya usaha dari pihak sekolah saja, namun juga diperlukan adanya kerja sama antar semua elemen, mulai dari elemen pendidikan, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Hal itu merupakan langkah-langkah dalam mengurangi bahkan mencegah perilaku-perilaku kemrosotan moral yang terjadi di usia sekolah dasar.

5) Bambang Baithurakman tentang Pendidikan Islam Dalam menghadapi Dekadensi Moral di Era Globalisasi

Penelitian Bambang tentang pandangan pendidikan Islam merupakan suatu proses untuk membentuk pribadi muslim yang seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi dirinya sebagai manusia baik jasmani maupun rohani. Pendidikan Islam di era globalisasi ini dihadapkan pada permasalahan dekadensi moral, maka dari itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan global yaitu lulusan peserta didik yang berkualitas, mempunyai kemampuan intelektual, spiritual dan emosional dan fisik seperti dalam pandangan Tholhah yaitu beriman, berilmu dan beramal.

6) Sri Haryati tentang Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum 2013 SDN 2 Gadel, Surabaya

Pendidikan karakter menjadi sesuatu yang penting untuk membentuk generasi

yang berkualitas. Pendidikan karakter merupakan salah satu alat untuk membimbing seseorang menjadi orang baik, sehingga mampu memfilter pengaruh yang tidak baik. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 perlu disambut gembira dan didukung semua pihak. Pendidikan karakter bukan hanya penting, tetapi mutlak dilakukan oleh setiap bangsa jika ingin menjadi bangsa yang beradab. Banyak fakta membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang maju bukan disebabkan bangsa tersebut memiliki sumber daya alam yang berlimpah, melainkan bangsa yang memiliki karakter unggul seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab dan lainnya.

Perkembangan ilmu, teknologi, komunikasi serta arus globalisasi membawa dampak perubahan pada berbagai aspek kehidupan tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Lingkungan rumah/keluarga yang seharusnya menjadi lembaga pendidikan, kurang berperan dalam membangun karakter anak. Orang tua lebih banyak sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk berinteraksi dan mendidik anak. Akibatnya, anak lebih banyak dididik oleh tayangan-tayangan TV maupun internet yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Contoh: kasus peserta didik SD yang memerkosa temannya merupakan contoh perilaku yang ditiru dari tayangan di internet. Lebih ironisnya, orang tua lebih bangga anaknya memperoleh nilai tinggi di kelas daripada memiliki perilaku terpuji. Di sisi lain, masyarakat juga sudah tidak lagi berperan aktif di dunia pendidikan. Pada masyarakat tradisional, orang masih mau menegur anak-anak yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma, biarpun bukan anaknya sendiri. Tetapi sekarang ini masyarakat kurang peduli dan acuh tak acuh terhadap

perilaku anak yang melanggar nilai atau norma. Tidak ada kontrol dari masyarakat atau justru masyarakatnya juga sedang sakit. Contoh adanya tawuran antar desa, tawuran antar pelajar, minum-minuman keras, dan lain-lain.

Kurang berfungsinya lembaga keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam pendidikan karakter, karakter anak lebih banyak dibangun oleh tayangan media TV dan internet. Padahal, meskipun salah satu fungsi media adalah mendidik, TV dan internet lebih banyak menerapkan fungsi yang lain; seperti usaha/bisnis. Untuk tujuan bisnis tersebut, tayangan atau program lebih merangsang birahi daripada intelektual, lebih memberi contoh berpikir mistis daripada berpikir rasional, lebih menonjolkan kekerasan daripada kelembutan, dan lebih menonjolkan sikap munafik daripada kearifan (Warsono, 2011:152). Demikian pentingnya pendidikan karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka dalam makalah ini penulis tertarik untuk mengkaji pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teori implementasi pendidikan karakter, dan upaya pencegahan dekadensi moral peserta didik maka kerangka pemikiran sebagai berikut : (1) Implementasi Pendidikan Karakter guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan. Bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi peserta didik dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-

kesimpulan. Ciri utama belajar menemukan, yaitu (a) mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan; (b) berpusat pada peserta didik; (c) kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. (2) Pembelajaran PKn lebih menekankan pada aspek “pendidikan” dari pada transfer konsep karena dalam pembelajaran PKn peserta didik diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. PKn juga membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat di mana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat dan dihadapkan pada berbagai permasalahan di lingkungan sekitarnya. (3) Pencegahan Dekadensi Moral merupakan hasil dari suatu upaya pendidikan karakter pada mata pelajaran PKn dan tindak mengajar PKn. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses pembelajaran sehari-hari. Dari sisi peserta didik, sikap berakhlak baik, sopan, tidak membuat hal-hal yang aneh saat sedang berlangsung proses pembelajaran merupakan tujuan pembelajaran dari puncak proses belajar. Hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku, sikap, akhlak sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Bagan 2.1. Skema kerangka pikir

